SURAT KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 13/MIP-UMY/XII/2016

tentang:

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT PANITIA SELEKSI PERANGKAT DESA KARANGWUNI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Ketua Program Studi Masister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta dipandang perlu menetapkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2017
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dengan baik, maka dari itu diperlukan surat keputusan Ketua Program Studi

Mengingat :
1. Pedoman PP Muhammadiyah tentang Pergurtuan Tinggi Muhammadiyah
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Memperhatikan : Keputusan rapat Pengelola Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 1 September 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 2 september 2016 hingga 2 November 2016 mengangkat nama-nama Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat Panitia Seleksi Perangkat Desa

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan dibetulkan kembali;

Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai amanat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal, 2 September 2016 M

Ketua Program Studi,

Dr. Dyah Mutiarin, MSi.
NIK : 19711108201004163 089

Tembusan kepada Yth.:
1. Rektor UMY,
2. Ka. Biro Keuangan UMY
3. Direktur Pascasarjana UMY
4. Arsip

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
NOMOR : 13/MIP-UMY/XII/2016

tentang:

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SELEKSI PERANGKAT DESA KARANGWUNI
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN AKADEMIK
1	Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc	Lektor Kepala
2	Dr. Dyah Mutiarin, M.Si	Lektor Kepala
3	Dr. Suranto, M.Pol	Lektor Kepala
4	Dr. Ulung Pribadi, M.Si	Lektor Kepala
5	Dr. Zuly Qodir	Lektor
6	Dr. Titin Purwaningsih, M.Si	Lektor
7	Eko Priyo Purnomo, M.Si, M.Res, Ph.D	Lektor
8	Rahmawati Hussein, Ph.D	Lektor

Ditetapkan di Yogyakarta,
Pada tanggal, 2 September 2016 M

Ketua Program Studi,

Dr. Dyah Mutiarin, MSi.
NIK : 19711108201004163 089

I. SOAL: PANCASILA

1. Pancasila dimaknai sebagai *way of life.* Dalam hal ini Pancasila memiliki makna:
   a. tujuan hidup
   b. pegangan hidup
   c. pedoman hidup
   d. perjalanan hidup
   e. kepribadian hidup

2. Kebebasan berserikat dan Hak Asasi Manusia dijamin di dalam UUD 1945, pasal:
   a. Pasal 25
   b. Pasal 26
   c. Pasal 27
   d. Pasal 28
   e. Pasal 29

3. Demokrasi Pancasila yang termaktub dalam sila ke-4 Pancasila, dalam hal pengambilan keputusan adalah:
   a. masalah diselesaikan dengan hati-hati
   b. mendahulukan kepentingan individu dan kelompok
   c. keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
   d. keputusan diambil melalui *voting*
   e. mengutamakan pendapat pemimpin

4. Mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, merupakan cerminan dari sila Pancasila, yaitu:
   a. Sila ke-1
   b. Sila ke-2
   c. Sila ke-3
   d. Sila ke-4
   e. Sila ke-5

5. Program Bela Beli Kulon Progo ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke:
   a. 1 (satu)
   b. 5 (lima)
   c. 3 (tiga)
   d. 4 (empat)
   e. 2 (dua)

6. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum serta pedoman untuk menjalankan kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan:
   a. dasar dan ideologi negara
   b. kemauan negara
   c. keputusan bersama seluruh rakyat
   d. pemikiran negara baru
   e. kesepakatan para pendiri bangsa

7. Intisari nilai-nilai Pancasila yang tercantum dibawah ini adalah :
   a. nilai harapan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan
   b. nilai ketuhanan, nilai kedermawanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan
   c. nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai individu, nilai kerakyatan, nilai keadilan
   d. nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kebersamaan, nilai keadilan
   e. nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan

II. SOAL: UUD 1945

8. Badan yang bertugas mengaudit keuangan negara dan ditetapkan kedudukannya dalam Amandemen UUD 1945 pasal 23 E adalah:
   a. DPD
   b. KPK
   c. BPKP
   d. BPK
   e. BNPB

9. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 berisi tujuan Nasional, kecuali:
   a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
   b. memajukan kesejahteraan umum
   c. mencerdaskan kehidupan bangsa
   d. menjaga persatuan nasional
   e. ikut melaksanakan ketertiban dunia

10. Presiden dan para menteri disebut dengan:
   a. Parlemen
   b. Kabinet
   c. Birokrasi
   d. Lembaga Pemerintah
   e. Perdana Menteri

11. Presiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari:
   a. MK
   b. DPR
   c. MPR
   d. DPD
   e. MA

12. Presiden memberikan Amnesti dan dan Abolisi dengan memperhatikan pertimbangan dari:
   a. MK
   b. DPR
   c. MPR
   d. DPD
   e. MA

13. Dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
   Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem:
   a. Negara hukum
   b. Negara otoriter
   c. Negara kesejahteraan
   d. Negara sebagal penjaga malam
   e. Negara hukum dalam arti terbatas

14. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 3, yang

berwenang memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah:
a. DPR
b. DPD
c. MK
d. MA
e. MPR

15. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV terdapat pada :
a. Pasal 9
b. Pasal 10
c. Pasal 11
d. Pasal 12
e. Pasal 13

III. SOAL: BAHASA INDONESIA

16. Kalimat penutup surat dinas yang benar adalah:
a. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terimakasih.
b. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Bapak/Ibu.
c. Terimakasih, ucapkan atas perhatian Bapak/Ibu.
d. Atas Bapak/Ibu perhatian saya haturkan terima kasih.
e. Saya ucapkan banyak perhatiannya.

17. Penulisan kata serapan yang benar adalah:
a. fluktuatif, maxsimal
b. fluktuatif, maksimal
c. vluktuatif, maximal
d. fluktuatif, maximal
e. fluktuatip, maksimal

18. Berikut adalah jenis-jenis surat dinas yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, kecuali:
a. Surat Pemberitahuan
b. Surat Edaran
c. Surat Perintah
d. Surat Keputusan
e. Surat Mandat

19. Penulisan akronim yang benar terdapat dalam kalimat dibawah ini, kecuali :
    a. Upaya menjaga stabilitas harga pangan strategis jangka panjang dilakukan oleh Bulog.
    b. Bappenas ikut mendukung ketahanan pangan yang merata antar wilayah di Indonesia.
    c. Masyarakat Indonesia menginginkan seluruh proses tahapan Pemilu secara transparan.
    d. Presiden mempersiapkan penerbitan uang rupiah dengan gambar baru pahlawan nasional melalui Kepres Nomor 31 Tahun 2016.
    e. Brimob memperkuat fungsi Kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasi wilayah.

20. Penulisan kata-kata berikut ini manakah yang tepat?
    a. Jumat – ijin - ijazah
    b. Jumat – izin - ijasah
    c. Jum'at – ijin - ijazah
    d. Jumat – izin - ijazah
    e. Jum'at – izin - izajah

21. (1) Objek wisata Pantai Indrayanti telah dilengkapi dengan akses sarana dan prasarana pariwisata untuk memudahkan wisatawan menikmati keindahan pantai. (2) Wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menggunakan fasilitas toilet umum dan rumah makan disekitarnya. (3) Di sepanjang tepi Pantai Indrayanti terlihat berjejer gazebo tempat menikmati pemandangan pantai. (4) Dengan biaya Rp 10.000,00 saja per orang, para wisatawan dapat menikmati keindahan pantai. (5) Para pedagang ikut meramaikan situasi pantai Indrayanti.
    Pokok pikiran dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ...
    a. (1)
    b. (2)
    c. (3)
    d. (4)
    e. (5)

22. Pemerintah akan menggalakkan kembali kegiatan ….. agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di Indonesia.
Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah:
a. migrasi
b. imigrasi
c. urbanisasi
d. transmigrasi
e. emigrasi

23. Penulisan singkatan yang benar terdapat dalam kalimat …
a. Anak-anak disuruh mengerjakan latihan halaman 67 s/d 69.
b. Ana membeli baju baru seharga Rp. 250.000,00.
c. Guntar, SH diangkat sebagai hakim Pengadilan Tinggi.
d. Setelah menyelesaikan strata dua, Anis menyandang gelar MPD.
e. Setiap tahun ajaran baru, kami ditugasi untuk menyusun RAPBS.

24. Di bawah ini adalah bagian–bagian yang harus ada pada surat dinas, kecuali:
a. kop surat
b. tanda tangan penerima surat
c. nomor surat
d. lampiran
e. alamat surat

25. Barang siapa berbuat jasa
Mudahlah Tuhan mengampuni dosa
Maksud dari gurindam tersebut adalah
a. siapa yang berbuat dosa akan diampuni oleh Tuhan
b. siapa yang ingin mendapatkan ampunan harus berbuat baik
c. siapa yang berbuat kebaikan, hidupmu akan bahagia
d. orang yang beramal akan diampuni dosanya oleh Tuhan
e. orang yang dermawan akan disayang Tuhan

IV. SOAL: PEMERINTAHAN DAERAH

26. Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah adalah:
a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2014
b. Undang-Undang No. 21 Tahun 2014
c. Undang-Undang No. 22 Tahun 2014
d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
e. Undang-Undang No. 24 Tahun 2014

27. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan ……
    Jawaban yang benar adalah:
    a. Daerah Otonom
    b. Daerah
    c. Kecamatan
    d. Desa
    e. Dukuh

28. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Dibawah ini yang termasuk urusan pemerintahan absolut adalah:
    a. politik luar negeri
    b. pendidikan
    c. kesehatan
    d. sosial
    e. lingkungan Hidup

29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan …….
    Jawaban yang benar adalah:
    a. Daerah Otonom
    b. Daerah
    c. Kecamatan
    d. Desa
    e. Dukuh

30. Berikut ini adalah asas-asas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu:
    a. musyawarah mufakat, desentralisasi dan partisipasi
    b. desentralisasi, dekonsentasi dan mobilisasi
    c. dekonsentrasi, desentralisasi dan partisipasi
    d. desentralisasi, partisipasi, dan tugas pembantuan
    e. desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan

31. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh :
    a. Camat
    b. Bupati
    c. Walikota
    d. Gubernur
    e. Kepala Desa

32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode:
    a. 20 tahun
    b. 10 tahun
    c. 15 tahun
    d. 25 tahun
    e. 5 tahun

33. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah:
    a. Perangkat Daerah
    b. Kepala Daerah
    c. DPRD
    d. Kepala Daerah dan DPRD dibantu Perangkat Daerah
    e. Kepala Daerah dibantu Perangkat Daerah

34. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode:
    a. 20 tahun
    b. 10 tahun
    c. 15 tahun
    d. 5 tahun
    e. 1 tahun

35. Selain urusan wajib, daerah juga melaksanakan urusan pilihan. Berikut ini adalah urusan pilihan…kecuali:
    a. kesehatan
    b. pertanian
    c. peternakan
    d. kelautan
    e. pariwisata

36. Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah, maka dibentuk:
    a. Forum Koordinasi Nasional dan Daerah
    b. Forum Koordinasi Daerah
    c. Forum Koordinasi Pimpinan Pusat
    d. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
    e. Forum Koordinasi Pimpinan Pusat dan Daerah

37. Berikut ini adalah fungsi dari DPRD Kabupaten/Kota, kecuali:
    a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota
    b. fungsi anggaran
    c. fungsi pengawasan
    d. budgeting
    e. memilih Bupati dan Wakil Bupati

38. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dibawah ini, kecuali:
    a. Konsultasi publik
    b. Musyawarah
    c. Kemitraan
    d. Penyampaian aspirasi
    e. Menghasut masyarakat

39. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh:
    a. DPRD
    b. Kepala Daerah
    c. Bupati
    d. DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
    e. persetujuan bersama antar rakyat dan DPRD

40. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut, kecuali:
    a. Sekretariat Daerah
    b. Sekretariat DPRD
    c. Dinas
    d. Lembaga Teknis Daerah
    e. Desa

41. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggarakan pemerintahan daerah, kecuali:
    a. kepastian hukum
    b. keterbukaan
    c. proporsionalitas
    d. sportifitas
    e. profesionalitas

42. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom adalah pengertian dari :
    a. Daerah Otonom
    b. Urusan Pemerintahan
    c. Pemerintah Daerah
    d. Pemerintahan Daerah
    e. Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

43. Cakupan tugas Camat adalah, kecuali:
    a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
    b. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
    c. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
    d. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan
    e. menyelenggarakan administrasi keuangan

44. Tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat adalah:
    a. Kepolisian
    b. Tentara
    c. Satuan Polisi Pamong Praja
    d. Masyarakat
    e. Hansip

45. Berikut ini adalah arah dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali:
    a. terwujudnya kesejahteraan masyarakat
    b. peningkatan daya saing daerah
    c. peningkatan pelayanan
    d. pemberdayaan masyarakat
    e. mengadili masyarakat yang melanggar hukum

V. SOAL: PEMERINTAHAN DESA

46. Undang-Undang tentang Desa adalah:
    a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
    b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
    c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
    d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
    e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

47. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pengertian tentang:
    a. Desa
    b. Kecamatan
    c. Pedukuhan
    d. RW
    e. RT

48. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah pengertian dari :
    a. Penyelenggara Desa
    b. Pemerintah Desa
    c. Desa
    d. Perangkat Desa
    e. Kecamatan

49. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama:
    a. 6 (enam) tahun
    b. 5 (lima) tahun
    c. 4 (empat) tahun
    d. 3 (tiga) tahun
    e. 7 (tujuh) tahun

50. Dana Desa digunakan untuk berbagai hal seperti tertulis di bawah ini, kecuali :
    a. membiayai penyelenggaraan pemerintahan
    b. pembangunan
    c. pemberdayaan masyarakat
    d. kemasyarakatan
    e. penelitian

51. Penggunaan Dana Desa mengacu pada :
    a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
    b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
    c. Rencana Kerja Pemerintah Desa
    d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
    e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

52. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
    a. Kepala Desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan
    b. Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, dan BPD
    c. Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis, BPD, dan LPMD
    d. Sekretariat Desa dan Pelaksana Kewilayahan
    e. Sekretariat Desa, dan Pelaksana Teknis

53. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai:
    a. Kepala Administrasi Pemerintahan Desa
    b. unsur pimpinan Sekretariat Desa
    c. unsur pelaksana teknis
    d. unsur pelaksana kewilayahan
    e. unsur LPMD

54. Kepala urusan berkedudukan sebagai:
    a. unsur staf sekretariat
    b. unsur pelaksana teknis
    c. unsur pelaksana kewilayahan
    d. unsur pimpinan sekretariat
    e. unsur kepala seksi kemasyarakatan

55. Atasan langsung Dukuh adalah :
    a. Kepala Desa
    b. Sekretaris Desa
    c. BPD
    d. LPMD
    e. Seksi Pemerintahan

56. Yang dimaksud dengan keuangan Desa adalah :
    a. semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
    b. pengeluaran desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
    c. pendapatan desa yang dapat bersumber dari mana saja
    d. aliran Kas Desa
    e. sumber-sumber pendapatan desa

57. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah:
    a. rencana keuangan tahunan Pemerintahan Provinsi
    b. rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten
    c. rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
    d. rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota
    e. rencana pendapatan tahunan Pemerintah Desa

58. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, merupakan pengertian dari:
    a. Alokasi Dana Desa
    b. Transfer ke Daerah
    c. Keuangan Desa
    d. Dana Desa
    e. Pendapatan Desa

59. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama :
    a. Perangkat Desa
    b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
    c. Badan Permusyawaratan Desa.
    d. Sekretaris Desa
    e. PKK

60. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat ….bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
    a. 1 (satu) bulan
    b. 2 (dua) bulan
    c. 3 (tiga) bulan
    d. 4 (empat) bulan
    e. 5 (lima) bulan

61. Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis adalah pengertian dari:
    a. Badan Perwakilan Desa
    b. Badan Permusyarawatan Desa
    c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
    d. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
    e. Kelompok Swadaya Masyarakat

62. Musyawarah desa merupakan forum permusyawarata yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan paling tidak
    a. sekali dalam 1 tahun
    b. sekali dalam 5 tahun
    c. dua kali dalam 1 tahun
    d. sekali dalam 2 tahun
    e. sekali dalam 3 tahun

63. Berikut ini merupakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat Desa, kecuali:
    a. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
    b. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
    c. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
    d. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa;
    e. menata sistem organisasi desa

64. Pelaksanaan kerjasama antar-Desa diatur dengan:
    a. Peraturan bersama Kepala Desa
    b. Peraturan Desa
    c. Keputusan Kepala Desa
    d. Peraturan BPD
    e. Keputusan BPD

65. Lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat disebut:
    a. Institusi Desa
    b. Lembaga kemasyarakatan Desa
    c. Lembaga permusyawaratan Desa
    d. Lembaga administrasi Desa
    e. Lembaga partisipasi Desa

VI. SOAL: PENGETAHUAN UMUM

66. Dibawah ini batas administratif wilayah Desa Karangwuni, kecuali:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kulwaru, Desa Sogan, Desa Plumbon
    b. sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
    c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Glagah
    d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bojong dan Desa Garongan
    e. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngestiharjo

67. Wilayah Desa Karangwuni terdiri dari:
    a. 6 Pedukuhan, 12 RW dan 24 RT
    b. 6 Pedukuhan, 10 RW dan 25 RT
    c. 6 Pedukuhan, 12 RW dan 25 RT
    d. 6 Pedukuhan, 10 RW dan 24 RT
    e. 6 Pedukuhan, 10 RW dan 25 RT

68. Berikut adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Karangwuni berdasarkan RPJMDes 2016-2021 bidang sosial, kecuali:
    a. Bantuan kepada keluarga miskin/terlantar
    b. Pemberdayaan keluarga miskin/anak terlantar/anak jalanan
    c. Perlindungan terhadap anjal serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
    d. Peningkatan sarana prasarana peribadatan
    e. Penguatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang mandiri

69. Terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat Karangwuni melalui dukungan sumber daya manusia yang ulet, jujur, profesional, berwawasan luas, berdaya saing menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sadar hukum yang dijiwai oleh iman dan taqwa serta cinta Desa Karangwuni adalah:
    a. Misi Desa Karangwuni
    b. Slogan Desa Karangwuni
    c. Karakter Desa Karangwuni
    d. Visi Desa Karangwuni
    e. Visi dan Misi Desa Karangwuni

70. Tradisi Ruwahan di Desa Karangwuni, dilakukan setiap tanggal…:
    a. 1 Ruwah
    b. 12 Ruwah
    c. 21 Ruwah
    d. 25 Ruwah
    e. 27 Ruwah

71. Masjid yang pertama kali dibangun di Desa Karangwuni Kecamatan Wates kabupaten Kulon Progo adalah:
    a. Al-Ikhlas
    b. Al-Mutaqqin
    c. Al-Arsyad
    d. Al-Amin
    e. Al-Falah

72. Balai Desa Karangwuni terletak di:
    a. Dusun Keboan, RT 8 RW 5
    b. Dusun Karangwuni, RT 8 RW 4
    c. Dusun Kriyan, RT 7 RW 4
    d. Dusun Karangwuni, RT 7 RW 5
    e. Dusun Pancas, RT 8 RW 4

73. Alat transportasi tradisional yang digunakan masyarakat Desa Karangwuni untuk menuju Desa Sogan sebelum adanya jembatan Glagah adalah:
    a. Andong
    b. Keseran
    c. Sepeda
    d. Becak
    e. Prahu Gethek

74. Desa Karangwuni memiliki tim sepak bola yang bernama:
    a. PS Naga Putih
    b. PS Kuda Putih
    c. PS Garuda
    d. PS Macan Putih
    e. PS Jayabaya

75. Desa Karangwuni mempunyai sebuah lapangan sepak bola yang terletak di dusun:
    a. Pancas
    b. Keboan
    c. Karangwuni
    d. Karangrejo
    e. Karanganyar

VII. SOAL: PENGETAHUAN DASAR KOMPUTER

76. Perangkat komputer yang berupa perintah atau instruksi yang mengendalikan komputer adalah:
    a. hardware
    b. harddisk
    c. software
    d. brainware
    e. flashdisk

77. Pada komputer ada perangkat yang berfungsi menjalankan aplikasi-aplikasi disebut….
    a. software
    b. hard disk
    c. memori
    d. hardware
    e. memory chart

78. Perangkat lunak aplikasi pengolah kata, kecuali:
    a. microsoft word
    b. power point
    c. pagemaker
    d. notepad
    e. symbian

79. Fungsi yang digunakan untuk memiringkan tulisan adalah:
    a. bold
    b. italic
    c. underline
    d. justify
    e. centre

80. Proses menghidupkan kembali perangkat computer untuk mengaktifkan system operasi disebut:
    a. control program
    b. processing program
    c. plug and play
    d. booting
    e. bios

81. Jenis data yang bisa disisipkan pada program pengolah kata, kecuali:
    a. gambar
    b. video
    c. grafik
    d. teks
    e. angka

82. Menyimpan dokumen yang pernah disimpan sebelumya dengan nama yang berbeda disebut:
    a. save as
    b. save
    c. open
    d. open as
    e. close

83. Berikut yang tergolong dalam kelompok *microsoft office* adalah:
    a. microsoft grafik
    b. acrobat raeder
    c. internet explorer
    d. microsoft word
    e. microsoft line

84. Tombol yang ditekan untuk menghapus karakter tulisan ke arah kiri dari kursor adalah;
    a. backspace
    b. erase
    c. delete
    d. justify
    e. entre

85. Microsoft Word adalah salah satu program aplikasi pengolah:
    a. angka
    b. database
    c. gambar
    d. kata
    e. foto

VIII. SOAL : MUATAN LOKAL (SEKRETARIS DESA)

86. Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kulon Progo adalah:
    a. Perda No. 1 tahun 2015
    b. Perda No. 2 tahun 2015
    c. Perda No. 3 tahun 2015
    d. Perda No. 4 tahun 2015
    e. Perda No. 5 tahun 2015

87. Kebijakan Umum Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam enam tahun ke depan, tertuang dalam:
    a. Repelita Desa
    b. RPJPDesa
    c. Rencana Pembangunan Desa
    d. RPJMDesa
    e. Rencana Kegiatan Desa

88. Pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional terdiri dari:
    a. Sekretaris Desa
    b. Dukuh
    c. Urusan Perencanaan dan Keuangan
    d. Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan, Seksi Kemasyarakatan
    e. Urusan Umum Aparatur Desa dan Aset

89. RKP Desa adalah singkatan dari:
    a. Rencana Kerja Pembangunan Desa
    b. Rencana Kerja Pemerintah Desa
    c. Rencana Kerja Pemberdayaan Desa
    d. Rencana Kerja Permusyawaratan Desa
    e. Rencana Kerja Pelayanan Desa

90. Salah satu misi Desa Karangwuni adalah:
    a. memberikan pelayanan seadanya bagi masyarakat
    b. memberikan perlindungan terhadap masyarakat
    c. memberikan hasil yang memuaskan bagi masayarakat
    d. memberikan pelayanan bagi masyarakat tertentu
    e. memberikan solusi terbaik bagi masyarakatnya

91. Perangkat desa di Desa Karangwuni terdiri atas:
    a. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf
    b. Kepala Desa, Kepala Bagian dan BPD
    c. Dukuh dan Kepala Bagian
    d. Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf
    e. Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Bagian dan BPD

92. Dalam struktur organisasi desa di Kabupaten Kulon Progo, Kepala Urusan (Kaur) berada dibawah:
    a. Camat
    b. Kades
    c. Sekdes
    d. Dukuh
    e. RW

93. Berdasarkan Perda No. 1 tahun 2015, Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu berjumlah :
    a. 3 (tiga)
    b. 4 (empat)
    c. 5 (lima)
    d. 6 (enam)
    e. 7 (tujuh)

94. Dibawah ini adalah termasuk tugas Sekretaris Desa, kecuali:
    a. melaksanakan kegiatan umum dan aparatur desa
    b. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan aset desa
    c. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
    d. melaksanakan kegiatan perencanaan
    e. mewakili Pemerintah Desa di Pengadilan

95. Dibawah ini adalah termasuk fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut, kecuali :
    a. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan dilakukan oleh perangkat desa
    b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
    c. penyiapan program kerja
    d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
    e. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa

96. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada:
    a. Kepala Desa
    b. Masyarakat
    c. BPD
    d. Bupati
    e. Camat

97. Sekretaris Desa juga bertindak selaku koordinator pelaksanaan, pengelolaan:
    a. keuangan Desa
    b. keuangan Daerah
    c. keuangan RT
    d. keuangan RW
    e. keuangan Pedukuhan

98. Berikut ini adalah fungsi Sekretaris Desa dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, kecuali:
    a. tata naskah
    b. administrasi surat-menyurat
    c. arsip
    d. ekspedisi
    e. membina karang taruna

99. Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh:
    a. Kepala Urusan
    b. Kepala Seksi
    c. Pelaksana Kewilayahan
    d. Pelaksana Teknis
    e. Staf

100. Berikut ini yang merupakan termasuk tugas Sekretaris Desa yaitu:
    a. memantau, mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Desa
    b. memantau kegiatan sosial politik di Desa
    c. melaksanakan kegiatan umum dan aparatur Desa
    d. melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin
    e. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegaiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.